

LAPORAN PEMANTAUAN

Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah

Hari : Senin, 21 Juni 2021
Agenda : Pembahasan Kebijakan Transfer ke daerah dan Dana Desa Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022
Peserta : 1. Kementerian Keuangan RI
2. Koordinator Panja Pemerintah
3. Anggota Panja Banggar DPR RI

KEMENTERIAN KEUANGAN:

1. Covid-19 adalah *Shock* yang sangat besar, mengguncang perekonomian Indonesia dan membutuhkan biaya besar untuk menanganinya.
 - a. APBN 20: Respon fiskal dalam menghadapi awal pandemi
 - b. APBN 21: Peran fiskal untuk memperkuat pemulihan ekonomi
2. Biaya penanganan pandemi terlihat dari penurunan PDB dan tekanan terhadap APBN baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Ringkasan TKDD 2020-2021, Anggaran TKDD pada tahun 2021 mengalami peningkatan 2,4% dibandingkan dengan TA 2020 dengan prioritas tetap mendukung upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
4. Kebijakan TKDD 2021:
 - a. Mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas, nasional, melalui: a). Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. b). Dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi, dan dukungan terhadap UMKM.
 - b. Mensinergikan TKDD dan belanja K/L dalam pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan).
 - c. Mendorong belanja infrastruktur daerah melalui *Creative Financing* seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerjasama antar daerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN.
 - d. Redesign pengelolaan TKDD, terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja dan peningkatan akuntabilitas.
 - e. Meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi berbagai standar yang dilakukan.



5. Penyesuaian dan *Refocusing* TKDD 2021 untuk penanganan pandemi:



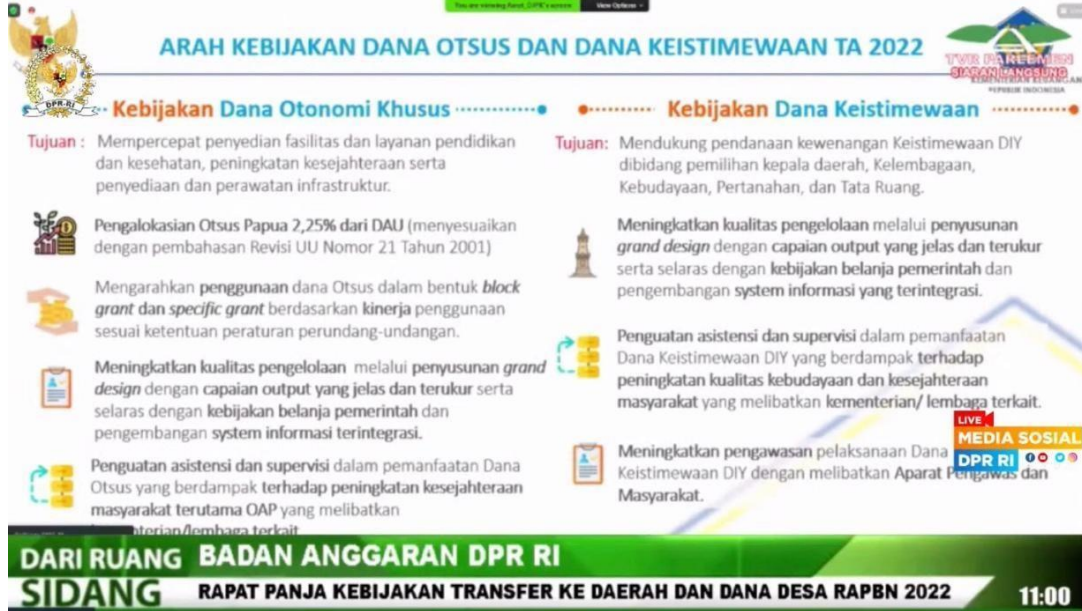
6. Reformasi fiskal untuk mendukung konsolidasi fiskal:
- Peningkatan pendapatan.
 - Penguatan *Spending Better*.
 - Pembiayaan inovatif dan *sustainable*.
7. Reformasi struktural harus dilakukan untuk mendukung agenda pembangunan jangka menengah.
- Human capital
 - Physical capital
 - Institutional development
8. Pokok-pokok kebijakan belanja negara 2022, fokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan quality control TKDD, kebijakan belanja negara:
- Fokus pada penguatan recovery dan reformasi struktural => reformasi SDM unggul, dan transformasi ekonomi.
 - Memperkuat spending better.
 - Penguatan desentralisasi fiskal dan quality control terhadap TKDD untuk mendukung recovery dan reformasi struktural.
9. Tantangan desentralisasi fiskal (1): Belanja daerah belum fokus untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas dan kebutuhan daerah. Jumlah program (29.623) dan kegiatan (263.135) sangat banyak, sehingga belanja APBD menjadi kurang efektif dan produktif dalam membenahi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
10. Tantangan desentralisasi fiskal (2): realisasi belanja daerah lambat, sehingga dana idle pemda di perbankan relatif tinggi, menunjukkan belum adanya upaya percepatan delivery layanan kepada masyarakat.



- a. Pada bulan mei 2021, posisi simpanan pemda Rp. 194,54,55 triliun, turun Rp 21,99 triliun (11,3%) dari posisi bulan april 2021.
 - b. Dibandingkan dengan posisi bulan mei 2020 (yoy), pada mei 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp. 6,96 triliun (4,20%).
 - c. Saldo rata-rata di akhir tahun selama 3 tahun terakhir sebesar Rp. 96 triliun.
 - d. Simpanan pemda tertinggi di perbankan posisi mei 2021 berada pada bank-bank yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp. 22,62 triliun, sedangkan terendah berada di Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai sebesar Rp. 0,93 triliun.
 - e. Penyaluran TKDD berbasis kinerja dan kebijakan pengendalian SiLPA daerah.
11. Tantangan desentralisasi fiskal(3): tata kelola APBD yang belum efisien dan disiplin belum mendorong upaya percepatan pemerataan pelayanan diseluruh pelosok NKRI. Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah melahirkan beberapa daerah yang berkinerja baik dan inovatif dalam penguatan pelayanan publik. Namun, masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya agar pemerataan pelayanan masyarakat dapat segera terwujud.
12. Pokok-pokok kebijakan TKDD TA 2022.
- a. Melanjutkan kebijakan perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
 - b. Melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama DAK fisik.
 - c. Melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan. Dengan adanya penambahan belanja kesehatan prioritas.
 - d. Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK, Penyaluran DAK fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah, dan DAK nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.
 - e. Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan covid-19 serta mendukung sektor prioritas.
13. Kebijakan DBH TA 2022:
- a. Alokasi DBH berdasarkan realisasi minimal 3 tahun terakhir untuk meminimalkan potensi kurang/ lebih bayar.
 - b. Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dan kinerja daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pemeliharaan lingkungan.
 - c. Penggunaan DBH CHT untuk dukungan bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
 - d. Penggunaan DBH SDA dana reboisasi untuk dukungan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.



14. Arah kebijakan DAU TA 2022, pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
15. Arah kebijakan DAK Fisik TA 2022, meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan publik antar daerah.
16. Arah kebijakan DAK Nonfisik TA 2022, membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah.
17. Arah kebijakan dana otsus dan dana keistimewaan TA 2022.



ARAH KEBIJAKAN DANA OTSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN TA 2022

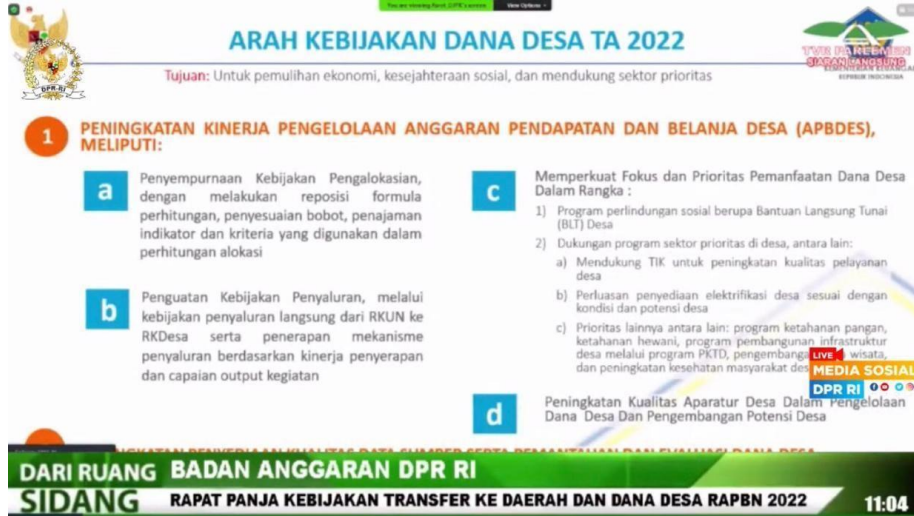
Kebijakan Dana Otonomi Khusus	Kebijakan Dana Keistimewaan
<p>Tujuan: Mempercepat penyediaan fasilitas dan layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan serta penyediaan dan perawatan infrastruktur.</p> <p>Pengalokasian Otsus Papua 2,25% dari DAU (menyesuaikan dengan pembahasan Revisi UU Nomor 21 Tahun 2001)</p> <p>Mengarahkan penggunaan dana Otsus dalam bentuk <i>block grant</i> dan <i>specific grant</i> berdasarkan kinerja penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan <i>grand design</i> dengan capaian output yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan pengembangan system informasi terintegrasi.</p> <p>Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Otsus yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama OAP yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait.</p>	<p>Tujuan: Mendukung pendanaan kewenangan Keistimewaan DIY dibidang pemilihan kepala daerah, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang.</p> <p>Meningkatkan kualitas pengelolaan melalui penyusunan <i>grand design</i> dengan capaian output yang jelas dan terukur serta selaras dengan kebijakan belanja pemerintah dan pengembangan system informasi yang terintegrasi.</p> <p>Penguatan asistensi dan supervisi dalam pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang berdampak terhadap peningkatan kualitas kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait.</p> <p>Meningkatkan pengawasan pelaksanaan Dana Keistimewaan DIY dengan melibatkan Aparat Pengawasan Masyarakat.</p>

DARI RUANG BADAN ANGGARAN DPR RI
SIDANG RAPAT PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA RAPBN 2022 11:00

18. Arah kebijakan DID TA 2022, mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola APBD, peningkatan layanan dasar publik bidang kesehatan, bidang pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah.
 - a. Perbaikan terhadap indikator penilaian kriteria utama dan kategori kinerja yang fokus, relevan dan memberikan dampak pada peningkatan tata kelola APBD, pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat disamping merupakan kinerja pemerintah daerah secara langsung.
 - b. Mengarahkan penggunaan DID untuk mendukung pencapaian prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. Pengalokasian DID dilakukan berdasarkan penilaian atas prestasi capaian kinerja tahun berjalan.
 - d. Penguatan asistensi dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan DID yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait.



19. Arah kebijakan dana desa TA 2022, untuk pemulihan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mendukung sektor prioritas.



ARAH KEBIJAKAN DANA DESA TA 2022

Tujuan: Untuk pemulihan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan mendukung sektor prioritas

1 PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES), MELIPUTI:

- a** Penyempurnaan Kebijakan Pengalokasian, dengan melakukan reposisi formula perhitungan, penyesuaian bobot, penajaman indikator dan kriteria yang digunakan dalam perhitungan alokasi
- b** Penguatan Kebijakan Penyaluran, melalui kebijakan penyaluran langsung dari RKUN ke RKDesa serta penerapan mekanisme penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output kegiatan
- c** Memperkuat Fokus dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Rangka :
 - 1) Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
 - 2) Dukungan program sektor prioritas di desa, antara lain:
 - a) Mendukung TIK untuk peningkatan kualitas pelayanan desa
 - b) Perluasan penyediaan elektrifikasi desa sesuai dengan kondisi dan potensi desa
 - c) Prioritas lainnya antara lain: program ketahanan pangan, ketahanan hewani, program pembangunan infrastruktur desa melalui program PKTD, pengembangan wisata, dan peningkatan kesehatan masyarakat desa
- d** Peningkatan Kualitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Pengembangan Potensi Desa

**DARI RUANG BADAN ANGGARAN DPR RI
SIDANG RAPAT PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA RAPBN 2022 11:04**

20. Dukungan TKDD pada program prioritas.



DUKUNGAN TKDD PADA PROGRAM PRIORITAS TA 2022

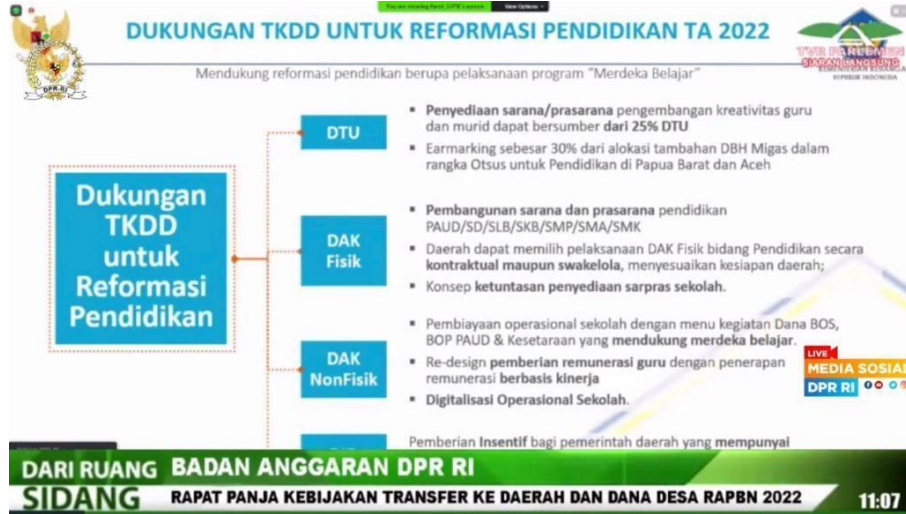
Dukungan TKDD pada Program Prioritas

- Reformasi Pendidikan**
Dukungan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan berdasarkan target "ketuntasan intervensi" dalam mendukung program "Merdeka Belajar"
- Reformasi Kesehatan**
Dukungan peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alkes Fasyankes di daerah dan desa
- Perlindungan Sosial***
Dukungan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi
*Dana Desa
- Peningkatan Infrastruktur**
Dukungan untuk peningkatan akses dan sarana prasarana melalui Tematik Infrastruktur Dasar, Tematik Destinasi Pariwisata dan Sentra IKI, Food Estate dan Sentra Produksi Pangan, dan Tematik Konektivitas.

**DARI RUANG BADAN ANGGARAN DPR RI
SIDANG RAPAT PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA RAPBN 2022 11:06**



21. Dukungan TKDD untuk reformasi pendidikan TA 2022.



DUKUNGAN TKDD UNTUK REFORMASI PENDIDIKAN TA 2022

Mendukung reformasi pendidikan berupa pelaksanaan program "Merdeka Belajar"

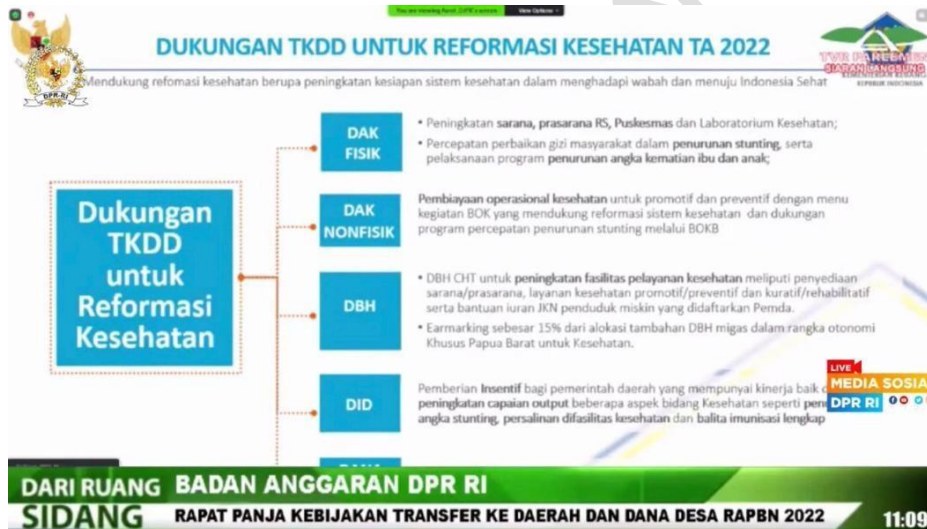
Dukungan TKDD untuk Reformasi Pendidikan

- DTU**
 - Penyediaan sarana/prasarana pengembangan kreativitas guru dan murid dapat bersumber dari 25% DTU
 - Earmarking sebesar 30% dari alokasi tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Pendidikan di Papua Barat dan Aceh
- DAK Fisik**
 - Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD/SD/SLB/SKB/SMP/SMA/SMK
 - Daerah dapat memilih pelaksanaan DAK Fisik bidang Pendidikan secara kontraktual maupun swakelola, menyesuaikan kesiapan daerah;
 - Konsep ketuntasan penyediaan sarpras sekolah.
- DAK NonFisik**
 - Pembiayaan operasional sekolah dengan menu kegiatan Dana BOS, BOP PAUD & Kesetaraan yang mendukung merdeka belajar.
 - Re-design pemberian remunerasi guru dengan penerapan remunerasi berbasis kinerja
 - Digitalisasi Operasional Sekolah.

Pemberian Insentif bagi pemerintah daerah yang mempunyai

DARI RUANG BADAN ANGGARAN DPR RI SIDANG RAPAT PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA RAPBN 2022 11:07

22. Dukungan TKDD untuk reformasi kesehatan TA 2022.



DUKUNGAN TKDD UNTUK REFORMASI KESEHATAN TA 2022

Mendukung reformasi kesehatan berupa peningkatan kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi wabah dan menuju Indonesia Sehat

Dukungan TKDD untuk Reformasi Kesehatan

- DAK FISIK**
 - Peningkatan sarana, prasarana RS, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan;
 - Percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan stunting, serta pelaksanaan program penurunan angka kematian ibu dan anak;
- DAK NONFISIK**
 - Pembiayaan operasional kesehatan untuk promotif dan preventif dengan menu kegiatan BOK yang mendukung reformasi sistem kesehatan dan dukungan program percepatan penurunan stunting melalui BOKB
- DBH**
 - DBH CHT untuk peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi penyediaan sarana/prasarana, layanan kesehatan promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif serta bantuan iuran JKN penduduk miskin yang terdaftar Pemda.
 - Earmarking sebesar 15% dari alokasi tambahan DBH migas dalam rangka otonomi Khusus Papua Barat untuk Kesehatan.
- DID**
 - Pemberian Insentif bagi pemerintah daerah yang mempunyai kinerja baik peningkatan capaian output beberapa aspek bidang Kesehatan seperti pengurangan angka stunting, pensalinan difasilitas kesehatan dan balita imunisasi lengkap

DARI RUANG BADAN ANGGARAN DPR RI SIDANG RAPAT PANJA KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA RAPBN 2022 11:09

23. Dukungan TKDD untuk peningkatan infrastruktur TA 2022, TKDD memberikan dukungan peningkatan enabling environment yang fokus pada kawasan terluar, daerah tertinggal dan pusat kegiatan perekonomian wilayah.

- Tematik daerah prioritas pariwisata dan sentra IKM.
 - Tematik daerah food estate dan sentra produksi pangan.
 - Tematik konektivitas.
24. Dukungan TKDD pada program prioritas lainnya TA 2022.
- Ketahanan pangan.
 - Pariwisata.
 - Teknologi informasi dan komunikasi.

25. Dukungan TKDD untuk ketahanan pangan TA 2022, TKDD memberikan dukungan pengembangan food estate (kawasan sentra produksi pangan) dan



- daerah pendukungnya serta kawasan sentra produksi pangan secara terintegrasi hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional.
26. Dukungan TKDD untuk pariwisata TA 2022, TKDD memberikan dukungan percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas kontribusi destinasi pariwisata prioritas yang didukung dengan penanganan jalan, pengelolaan sampah dan sarana prasarana pendukung, serta pasar rakyat penunjang pariwisata.
 - a. Dana Desa
 - b. DAK Fisik
 - c. DAK Nonfisik
 27. Dukungan TKDD untuk TIK TA 2022, TKDD memberikan dukungan pengembangan jaringan penyebarluasan informasi, mendukung keterjangkauan informasi, dan mendorong pengembangan daerah melalui jaringan yang lebih baik.

WAKIL KETUA BANGGAR:

- **H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P, (No. Anggota 9 – Dapil Jabar II)**
- Fraksi PKB
- Pendapat:
 1. DAK fisik penugasan 2021 menjadi bingkai untuk konsisten ketika tema ketahanan pangan ada ketahanan hewani.

FRAKSI:

- **Drs. Hamka Baco Kady, MS., (No. Anggota 341 – Dapil Sulsel I)**
- Fraksi Golkar
- Pendapat:
 1. Sesuai pemaparan perlu adanya quality control dalam penggunaan TKDD, karena penggunaan anggaran sangat lambat dan masih tersimpan di Bank apa setiap tahun yang kita hadapi seperti itu.
 2. Kurang adanya cara perhitungan DBH secara transparan ke daerah.
 3. Saya mendukung untuk memberikan pinjaman anggaran kepada daerah.
- Pertanyaan:
 1. Apa sanksi yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah terhadap metode-metode penggunaan anggaran belanja daerah ini apa memang sengaja dilambatkan atau memang harus terlambat begitu ?

FRAKSI:

- **Hj. Ratna Juwita Sari, S.E., M.M., (No. Anggota 46 – Dapil Jatim IX)**
- Fraksi PKB
- Pendapat:
 1. Saya harap Anggaran belanja daerah untuk segera di dorong dalam bentuk program yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat.



2. Kami ingin mengusulkan agar skema kebijakan dana insentif daerah ini benar2 bisa diformulasikan dalam skema regional insentif mechanism.

FRAKSI:

- **Dr. H. Irwan, S.IP., M.P, (No. Anggota 568 – Dapil Kalimantan Timur)**
- Fraksi Partai Demokrat
- Pendapat:
 1. Terkait TKDD harus benar-benar berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
 2. Masukan kami pembangunan infrastruktur harus berkorelasi dan berintegrasi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumberdaya lainnya.
 3. Pemerintah pusat perlu proaktif untuk sosialisasi asistensi sistem pelaporan yang harus dilakukan pemerintah daerah agar dapat akuntabel.

FRAKSI:

- **Dolfie O.F.P (No. Anggota 187 – Dapil Jateng IV)**
- Fraksi PDI-P
- Pertanyaan:
 1. Dalam strategi pengalokasian TKDD apakah sudah memperhitungkan aspek kekhususan?
 2. Mengapa DAK, DAU, dan DBH belum teralokasikan secara baik sampai ke tingkat desa ?

FRAKSI:

- **Fauzi H. Amro, M.Si., (No. Anggota 356 – Dapil Sumsel I)**
- Fraksi Partai NasDem
- Pendapat:
 1. TKDD 2022 hampir tidak ada perbedaannya dengan TKDD 2021.
 2. Alokasi TKDD kurang lebih 30% s/d 40% dari total APBN kita ada beberapa catatan penting untuk di respon dana ini harus menyesuaikan dengan kondisi pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.
 3. Perlu adanya rumusan pemerataan pembangunan daerah untuk membedakan mana DAK Fisik dan DAK Nonfisik.

FRAKSI:

- **Wihadi Wiyanto, SH (No. Anggota 114 – Dapil Jateng IX)**
- Fraksi Partai Gerindra
- Pendapat:
 1. TKDD masih cenderung sama dengan tahun sebelumnya tidak ada perbedaan yang signifikan.
 2. TKDD belum terealisasi secara baik oleh pemerintah pusat ke daerah.
 3. Angka untuk ketahanan pangan perlu diperjelas untuk menjadi konsen pemerintah di tangan pandemi covid-19.



FRAKSI:

- **H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si., (No. Anggota 410 – Dapil NAD II)**
- Fraksi PKS
- Pendapat:
 1. Jangan biarkan dana idle diam karena menimbulkan penyakit pada daerah-daerah.
 2. Perlu dipertimbangkan untuk dana otsus harus selalu ada selama daerah itu menyangang atribut daerah khusus.
 3. Pemerintah pusat harusnya punya inisiatif untuk mengaudit dengan tujuan khusus.

FRAKSI:

- **H. Syarief Abdullah Alkadrie, SH., MH., (No. Anggota 388 – Dapil Kalbar I)**
- Fraksi Partai NasDem
- Pendapat:
 1. Pemerintah sudah memiliki rumusan harusnya dana desa tidak otak-atik namun dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dll di tengah pandemi.
 2. Berharap tidak ada refocusing.

FRAKSI:

- **Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H., (No. Anggota 291 – Dapil Jabar IV)**
- Fraksi Partai Golkar
- Pendapat:
 1. Saya berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu serius perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2022.
 2. Ketergantungan daerah terhadap TKDD sangat besar bahkan secara nasional APBD bergantung pada TKDD.

PIMPINAN BANGGAR:

- **MH. Said Abdullah, (No. Anggota 224 – Dapil Jatim XI)**
- Fraksi PDI-P
- Pendapat:
 1. Setiap bicara TKDD, tidak ada satupun kabupaten atau kota yang mandiri dari APBN

